



MEMIMPIN PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Panduan Singkat untuk Sekretaris Perusahaan

Disusun oleh:
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

Didukung oleh:
Global Reporting Initiative (GRI) dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Kebijakan Penggunaan

Panduan ini dimaksudkan sebagai kumpulan petunjuk singkat yang bertujuan untuk membantu Sekretaris Perusahaan dalam memimpin proses penyusunan Laporan Berkelanjutan untuk Emiten dan/atau Perusahaan Publik. Namun, panduan ini tidak menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik beserta peraturan/ketentuan pelaksanaannya (secara bersama-sama disebut "**Peraturan OJK tentang Laporan Keberlanjutan**") dan standar pelaporan lainnya yang berlaku secara internasional, dalam hal ini Global Reporting Initiative ("**GRI**") Standards 2021. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang diungkapkan dalam Pedoman ini tidak mengikat dan tidak mencerminkan pandangan dari Indonesia Corporate Secretary Association ("**ICSA**"), Tim Penyusun, serta institusi manapun. Pedoman ini tidak untuk diperjualbelikan dan dilipatgandakan untuk tujuan mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun juga. Jika Anda menggunakan Pedoman ini, maka Anda dengan ini telah menyetujui kebijakan penggunaan yang tertera di halaman ini.

Tim Penyusun

Tim Penulis dan Penyelaras Akhir

2022-2024



Hendri Yulius Wijaya

Suandi Darmawan Tanuwijanto

Tata Letak dan Desain

ICSA

Diterbitkan pada bulan Februari 2023

BAB 1

Mari Berkenalan dengan **Laporan Berkelanjutan!**

Definisi

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu Lembaga Jasa Keuangan ("LJK"), Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.



Landasan Hukum



Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, atau Perusahaan Publik ("POJK 51/2017").



Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik ("SEOJK 16/2021").



Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK 51/2017



Tenggat Waktu

Penyampaian Laporan Keberlanjutan ke OJK dan publikasi Laporan Keberlanjutan kepada masyarakat dilakukan setiap tahun, paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan atau bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan, yaitu **paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.**

Bahasa, Bentuk dan Data

Laporan Keberlanjutan dibuat dalam **Bahasa Indonesia**. Laporan Keberlanjutan yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, yang paling sedikit menggunakan bahasa Inggris, secara berdampingan.

Laporan Keberlanjutan disajikan dalam bentuk **dokumen cetak** dan **dokumen elektronik**. Laporan Keberlanjutan dapat dibuat terpisah atau disajikan sebagai bagian dari Laporan Tahunan.

Data-data untuk tujuan **pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial harus mencakup data-data 3 (tiga) tahun terakhir** (untuk LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang telah beroperasi lebih dari (tiga) tahun).



BAB 2

Proses Penyusunan Laporan Berkelanjutan

Untuk menyusun Laporan Keberlanjutan pertama kalinya, Sekretaris Perusahaan dapat melakukan langkah-langkah praktis di bawah ini.



1

Memahami Regulasi

Sekretaris Perusahaan, khususnya untuk Emiten dan Perusahaan Publik, **dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris**, harus dapat memahami peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal, dalam hal ini terutama regulasi atau landasan hukum yang terkait dengan kewajiban untuk menyusun Laporan Keberlanjutan.

Landasan hukum utama dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan adalah POJK 51/2017 yang mengatur mengatur secara garis besar dan secara umum mengenai kewajiban bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.

Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. **Dalam arti luas Keuangan Berkelanjutan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dapat dimaknai sebagai kegiatan berkelanjutan (*sustainable operation*), yaitu kegiatan operasi perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.**

Sejumlah **contoh** dari topik kinerja ekonomi, lingkungan hidup dan sosial tersebut, serta isi selengkapnya dari Laporan Keberlanjutan diatur lebih lanjut dalam **Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik** yaitu yang tercantum pada Lampiran II SEOJK 16/2021. Khusus Emiten dan Perusahaan Publik yang merupakan Bank atau LJK dapat menggunakan Pedoman Teknis sebagaimana tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan **Pedoman Teknis Bagi Bank terkait Implementasi POJK 51/2017** atau pedoman teknis lainnya yang berlaku bagi LJK.

- Bentuk dan isi yang diatur dalam pedoman teknis tersebut merupakan persyaratan minimum, apabila diperlukan pengungkapan informasi dapat diperluas sesuai kebutuhan, termasuk dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku.

Laporan Keberlanjutan memuat kebijakan-kebijakan, program-program, dan capaiannya baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif terkait aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial tersebut wajib untuk mencakupi topik-topik berikut ini:

Kinerja Ekonomi	Kinerja Lingkungan Hidup	Kinerja Sosial
• Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi • Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	• Aspek Umum: Biaya Lingkungan Hidup • Aspek Material: Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan • Aspek Energi — Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan — Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan • Aspek Air: Penggunaan Air • Aspek Keanekaragaman Hayati — Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati — Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati • Aspek Emisi — Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya — Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan • Aspek Limbah Dan Efluen — Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis — Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen — Tumpahan yang Terjadi (jika ada) • Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup: Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	• Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen • Aspek Ketenagakerjaan — Kesetaraan Kesempatan Bekerja — Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa — Upah Minimum Regional — Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman — Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai • Aspek Masyarakat — Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar — Pengaduan Masyarakat — Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan — Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan — Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan — Dampak Produk/Jasa — Jumlah Produk yang Ditarik Kembali — Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan



Untuk memastikan seluruh pengungkapan yang disyaratkan oleh POJK 51/2017 dalam Laporan Keberlanjutan, SEOJK 16/2021 menyediakan Daftar Pengungkapan yang wajib diisi dan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan, berisi indeks pengungkapan informasi dan halaman penyajian informasi tersebut

2

Memahami Standar Pelaporan

Untuk pengungkapan topik-topik yang disyaratkan oleh POJK 51/2017, Sekretaris LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dapat menyajikan Laporan Keberlanjutan dengan data dan narasi berdasarkan standar pelaporan yang berlaku secara internasional. Penyajian Laporan Keberlanjutan berdasarkan standar pelaporan internasional dapat juga diwajibkan oleh salah satu pemangku kepentingan, dalam hal ini contohnya kreditur.

Beberapa keuntungan menuliskan laporan dengan standar internasional, yaitu dapat:

- A** Menarik Investor
- B** Meningkatkan kualitas pelaporan dan reputasi perusahaan
- C** Menyajikan data yang sesuai dengan indikator yang umumnya digunakan oleh lembaga pemeringkat (**rating agency**) yang menilai kinerja keberlanjutan perusahaan.

Salah satu standar pelaporan internasional adalah The GRI Standards 2021 (Standar GRI 2021). Standar GRI bebas digunakan oleh siapapun dan dapat diunduh melalui tautan:

<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>



Perusahaan dapat menentukan dan memilih Standar GRI dan pengungkapan datanya yang sesuai dengan konteks dan kondisi bisnis perusahaan.



PERLU DIINGAT!

Penyajian isi Laporan Keberlanjutan berdasarkan Standar GRI 2021 tidak merupakan pilihan dan LJK, Emiten dan Perusahaan Publik tetap wajib untuk mengungkapkan isi Laporan Keberlanjutan sesuai dengan POJK 51/2017 dan peraturan pelaksanaannya.

Seluruh topik dalam POJK 51/2017 dapat dijawab dengan Standar GRI. Perhatikan ilustrasi di bawah ini tentang relasi POJK 51/2017 dan Standar GRI.

POJK 51/2017	Standar GRI
Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: a) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; c) tumpahan yang terjadi (jika ada)	GRI 306: Limbah dan Efluen Air limbah (efluen) dan Limbah 5 • Pengungkapan 306-1: Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan • Pengungkapan 306-2: Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan • Pengungkapan 306-3: Tumpahan yang signifikan • Pengungkapan 306-4: Pengangkutan limbah berbahaya • Pengungkapan 306-5: Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air

Tabel 2.1
Relasi POJK 51/2017 dan Standar GRI

3

Pemetaan Topik dan Pemilik Data Laporan

Pemetaan topik dilakukan untuk menentukan topik apa saja yang relevan dan signifikan untuk menjadi bagian dari isi laporan.

Pemetaan juga mencakup departemen mana yang terlibat langsung dengan topik tersebut.

Di bawah ini adalah contoh pemetaan topik dan departemen yang bertanggung jawab atas topik tertentu:

Topik	Departemen Pemilik Data	Nama Penanggung Jawab
Kinerja Ekonomi (Ekonomi)	Departemen Keuangan	Faisal Rachman Manajer Keuangan
Ketenagakerjaan (Sosial)	Departemen Sumber Daya Manusia	Ririn Radiawati K. Manajer Sumber Daya Manusia
Energi (Lingkungan)	Departemen Operasional/Produksi	Wina Indiarto Manager Operasional
Inovasi Produk Berkelanjutan (Inovasi Produk)	Departemen Research and Development	Andre Sebastian Manager R&D

Tabel 2.2

Contoh Tabel Pemetaan Topik dan Penanggung Jawab

Saran

Tabel ini dapat ditampilkan saat presentasi di hadapan jajaran pimpinan Top Manajemen untuk memperjelas siapa saja yang diusulkan terlibat dalam tim kerja.

4

Mendapatkan Komitmen dari Jajaran Pimpinan

Komitmen dan arahan dari jajaran pimpinan (*Top Management*) adalah kunci utama keberhasilan dalam penulisan Laporan Keberlanjutan.

Kepemimpinan dan arahan dari jajaran pimpinan mutlak diperlukan karena pembuatan Laporan Keberlanjutan akan melibatkan dan merupakan kolaborasi atau sinergi antar departemen yang menangani topik isi Laporan Keberlanjutan dan memiliki data, maka komitmen dari jajaran pimpinan dapat diwujudkan melalui:

- 1 Bentuk Tata kelola yang formal dan jelas, misalnya:
 - a. Penunjukan Penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana yang diwajibkan oleh POJK 51/2017, yang tugasnya antara lain bertindak sebagai penanggung jawab atas Laporan Berkelanjutan dan akan mengerahkan sumberdaya terkait dengan kegiatan pelaporan. Dalam hal ini bisa ditunjuk dari salah satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat (Sekretaris Perusahaan) dan/atau unit kerja.
 - b. Pembentukan Tim Kerja, yaitu tim kecil yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data dan penulisan isi Laporan Keberlanjutan, yang beranggotakan Sekretaris Perusahaan, sebagai Ketua Tim Kerja, dan para perwakilan departemen pemilik data terkait.

- 2 Pemahaman yang memadai tentang Laporan Keberlanjutan. Sekretaris Perusahaan dapat mengadakan 1 (satu) sesi paparan atau *refreshment* kepada jajaran pimpinan tentang kewajiban dan keuntungan dari pembuatan Laporan Keberlanjutan, diikuti dengan topik dan data yang dibutuhkan.

● ● ● Saran

Dilaksanakan secara berkala (misalnya: pada saat Rapat Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris) atau insidental (misalnya: ada perubahan jajaran pimpinan, maka dapat dilakukan pada orientasi) • Apabila sudah mempunyai Kerangka Acuan Keuangan Berkelanjutan/Kegiatan Berkelanjutan, *refreshment* atau Kerangka Acuan tersebut dapat dipaparkan pada saat penyusunan rencana kerja atau anggaran untuk tahun berikutnya

- 3 Penyusunan Kerangka Acuan Keuangan Berkelanjutan/Kegiatan Berkelanjutan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dapat menjadi nilai tambah dan bentuk komitmen yang nyata dari jajaran pimpinan serta akan mendukung penulisan narasi Laporan Keberlanjutan.

● ● ● Saran

- Kerangka Acuan ini sebaiknya dibuat secara formal dan disetujui oleh jajaran pimpinan
- Penyusunan Kerangka Acuan ini tidak perlu menyetujui kegiatan-kegiatan secara terperinci, namun bisa saja berisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau pilar-pilar acuan yang akan menjadi prioritas atau diutamakan dalam realisasinya (misalnya yang erat kaitannya dengan kegiatan usaha dari LJK, Emiten dan Perusahaan Publik)

5

Membentuk Tim Kecil dan Tenggat Waktu Pengumpulan Data

Setelah pemetaan dan mendapatkan komitmen dari jajaran pimpinan, Sekretaris Perusahaan dapat memimpin Tim Kerja untuk bisa memulai proses pengumpulan data dan penulisan isi Laporan Keberlanjutan.

Tim Kerja mempunyai pemahaman yang sama tentang Laporan Keberlanjutan dan juga untuk koordinasi dari pelaksanaan tugas Tim Kerja, Sekretaris Perusahaan dapat melakukan langkah-langkah berikut :

- 1 Workshop Internal/Pemahaman (*Refreshment*) mengenai POJK 51/2017 dan Standar GRI 2021 (2 -3 jam)
- 2 Penetapan tenggat waktu publikasi dan penyampaian Laporan Keberlanjutan kepada OJK dan standar yang akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan
- 3 Pemetaan data yang harus dikumpulkan beserta tenggat waktu pengumpulan data secara internal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan data:
 - Waktu ketersediaan data (contoh topik/data ekonomi akan tersedia setelah Laporan Keuangan as per 31 Desember 2021)
 - Feedback dari pemangku kepentingan atas Laporan Keberlanjutan periode sebelumnya, apabila ada (bisa merupakan telaah dari OJK ataupun formulir feedback yang diisi)
 - Tenggat waktu pekerjaan jasa konsultan atau pengolahan data secara internal

Saran

Ketiga Langkah-langkah tersebut sebaiknya dilakukan dalam 1 (satu) event yang sama, yaitu sebelum atau paling lambat bersamaan dengan Kick off penyusunan Laporan Keberlanjutan dengan konsultan atau secara internal apabila tidak menunjuk pihak ketiga

Internal Workshop dapat mengundang pihak eksternal sebagai narasumber, contohnya dari GRI dan/atau dari konsultan yang ditunjuk

Apabila penyusunan Laporan Keberlanjutan sudah lebih dari 1x, untuk periode pelaporan berikutnya Sekretaris Perusahaan bisa menyampaikan kepada Jajaran Pimpinan/Penanggung Jawab Keuangan/Kegiatan Berkelanjutan untuk pengumpulan data dapat dilakukan secara kuartalan atau semester, dengan tujuan untuk monitoring dengan rencana kerja tahunan/kerangka acuan dan juga dengan pertimbangan waktu (lebih cepat data tersedia)

Apabila dimungkinkan proses kolaborasi pengumpulan data dan/atau penyusunan Laporan Keberlanjutan dapat menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) bagi Sekretaris Perusahaan dan Tim Kerja

Di bawah ini adalah contoh templat yang dapat digunakan untuk pemetaan data untuk tim kerja internal:

Topik	GRI Standards	Penanggung Jawab	Tenggat Waktu
Ketenagakerjaan: Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman	Pengungkapan 403-5: Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Pengungkapan 403-6: Peningkatan kualitas kesehatan pekerja Pengungkapan 403-7: Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	Ririn Radiawati K. Manajer (Departemen Sumber Daya Manusia)	9 Januari 2023



*Tabel 2.3
Contoh Tabel Pemetaan Topik, Data,
dan Tenggat Waktu Pengumpulan Data*

6

Menuliskan Narasi untuk Pendamping Data

Data yang disajikan harus lengkap dengan data numerik yang didampingi dengan narasi penjelasan seperti:



Konteks Operasional Perusahaan yang Menjelaskan Kondisi Data

(misal, adanya kenaikan produksi; adanya penurunan permintaan, dll)



Tantangan atau Kendala dalam Setiap Topik

(misal, tantangan untuk pengurangan energi; tantangan dalam manajemen limbah)



Target dan Strategi

Untuk setiap topik, perusahaan dapat menyertakan target perbaikan yang ingin dicapai, periode pencapaian, dan strategi untuk mencapainya (misal, perusahaan berupaya untuk mengurangi limbah yang dibuang ke TPA sebesar 30% dari tahun 2022, untuk dicapai pada tahun 2025. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:.....)

7

Penulisan Laporan Oleh Konsultan

Apabila diperlukan, kegiatan merangkum data, penulisan narasi, dan desain laporan dapat dilakukan oleh konsultan Laporan Keberlanjutan.

Pemilihan konsultan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan indikator-indikator berikut ini:

1

PORTOFOLIO

Laporan perusahaan mana saja yang sudah pernah dibuat?
Apakah ada achievement khusus atas Laporan Keberlanjutan yang telah disusun oleh Konsultan

2

SERTIFIKASI

Sertifikasi apa saja yang dimiliki oleh copywriter atau Tim Konsultan?

3

ANGGOTA TIM KONSULTAN

Pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota tim yang akan menangani laporan.

4

BIAYA INVESTASI

Apa saja yang tercakup dalam biaya investasi yang disyaratkan?
Misal, penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris, jumlah frekuensi maksimal untuk revisi, fitur desain yang diberikan, dan lain-lain.

5

CONTOH TULISAN/DESAIN LAYOUT

Mensyaratkan calon konsultan untuk memberikan contoh tulisan atau desain yang pernah dikerjakan atau analisa singkat atas Laporan Keberlanjutan sebelumnya

● ● ● Saran

Libatkan jajaran pimpinan dan juga divisi *Corporate Communications* dalam memilih konsultan agar selera dan gaya penulisan sesuai dengan kriteria perusahaan

Verifikasi Laporan Keberlanjutan dan Umpan Balik

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap Laporan Keberlanjutan yang sudah disusun dan/atau yang akan diterbitkan, LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dapat menggunakan jasa verifikasi dari pihak independen sesuai dengan Peraturan OJK tentang Laporan Keberlanjutan. Layanan ini bisa didapatkan dari penyedia jasa assurance (assurance services provider) dan informasi mengenai penyedia jasa assurance yang independen tersebut wajib untuk diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan:

- 1 Nama penyedia jasa assurance (assurer) dan periode jasa assurance;
- 2 Kebijakan LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam memilih dan menentukan penyedia jasa assurance;
- 3 Hubungan antara LJK, Emiten dan Perusahaan Publik dengan penyedia jasa assurance dimana assurance harus dilakukan oleh pihak independen yang tidak terlibat dalam proses pembuatan laporan, sehingga tidak ada benturan kepentingan dan kualitas proses verifikasi tetap terjaga; dan
- 4 Laporan assurance.
LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib untuk mensisipkan Lembar Umpan Balik di dalam Laporan Keberlanjutan untuk diisi oleh Para Pemangku Kepentingan dan harus disertai dengan mekanisme pengiriman Lembar Umpan Balik yang sudah diisi, baik ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan Berkelanjutan. LJK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib untuk mengungkapkan informasi mengenai Umpan Balik yang diterima dan tanggapan terhadap Umpan Balik mengenai Laporan Keberlanjutan periode sebelumnya.

BAB 3

Kendala dan Solusi Penyusunan dalam Penulisan Laporan Keberlanjutan

Berikut ini adalah kendala yang umumnya dihadapi oleh Sekretaris Perusahaan dan Tim Kerja dalam proses penulisan Laporan Keberlanjutan. Setiap solusi yang dituliskan di sini dapat selalu disesuaikan dengan konteks perusahaan dan sektor usaha masing-masing.

1

Apa saja poin penting yang harus dijelaskan kepada Jajaran Pimpinan (Top Management) saat menjelaskan Laporan Keberlanjutan untuk pertama kali?

➤ **Pengertian Dasar Keberlanjutan dan ESG (Environmental, Social, and Governance)**

ESG adalah isu spesifik yang menjadi fokus perusahaan karena isu tersebut berdampak secara signifikan pada keberlanjutan bisnis perusahaan (*ke dalam*) dan juga pada pemangku kepentingan perusahaan (seperti, investor, masyarakat lokal, karyawan, lingkungan hidup, dan lain-lain) (*ke luar*).

Misalnya, perusahaan air mineral dalam kemasan akan mempertimbangkan isu limbah sebagai salah satu isu ESG, karena operasional mereka menghasilkan limbah plastik yang dapat merusak lingkungan (*ke luar*) dan berpengaruh pada bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola limbah plastik untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap operasional bisnisnya (*ke dalam*).

➤ Keberlanjutan merupakan arah perusahaan untuk menciptakan kinerja ESG yang baik sesuai dengan fokus dan sektor usahanya. Dengan kata lain, keberlanjutan bukanlah destinasi, tetapi 'arah tujuan/ orientasi'

● Penjelasan Dasar tentang Laporan Keberlanjutan

- Sekretaris Perusahaan dapat menjelaskan poin-poin tentang Laporan Keberlanjutan dari bab sebelumnya. Perlu dijelaskan bahwa Laporan Keberlanjutan seringkali disebut juga sebagai Laporan ESG.

Dalam konteks Indonesia, perusahaan harus melaporkan seluruh topik ESG yang sudah disyaratkan dalam **POJK 51/2017**. Sekretaris Perusahaan dapat memaparkan apa saja topik ESG yang dimaksud.

● Penjelasan Singkat tentang Standar GRI (GRI Standards)

- Untuk menuliskan topik ESG yang disyaratkan oleh POJK, perusahaan dapat merujuk pada Standar GRI 2021. Standar GRI 2021 merupakan standar internasional pelaporan keberlanjutan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai organisasi dunia.

Dengan menggunakan Standar GRI, Laporan Keberlanjutan perusahaan dapat menuliskan kinerja ESG atau keberlanjutannya sesuai dengan praktik dan indikator pelaporan ESG yang berlaku secara global.

● Manfaat Laporan Keberlanjutan

- Selain untuk memenuhi regulasi POJK, Laporan Keberlanjutan juga bermanfaat untuk mengkomunikasikan kinerja ESG perusahaan untuk membangun reputasi yang baik, menyiapkan langkah-langkah perbaikan ESG perusahaan untuk ke depannya, menarik perhatian investor, dan memberikan data yang komprehensif untuk lembaga rating internasional.

Untuk poin terakhir, lembaga rating internasional, seperti Morgan Stanley Capital Index (MSCI) dan Dow Jones, menggunakan Laporan Keberlanjutan sebagai salah satu sumber informasi, untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan yang akan menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan investasinya atau tidak.

Dengan demikian, penting sekali agar laporan keberlanjutan disusun sesuai standar internasional.

2

Bagaimana Mendorong Direksi untuk Memimpin Langkah Pertama Penyusunan Laporan Keberlanjutan?

Untuk mengumpulkan data-data ESG yang disyaratkan POJK, Jajaran Pimpinan/ Direksi/ CEO dapat merilis memo internal untuk pembentukan Tim Kerja yang terdiri dari perwakilan (misalnya, kepala divisi) dari berbagai departemen yang relevan untuk pengumpulan data.

Dalam memo internal tersebut, CEO dapat menjelaskan poin-poin di bawah ini:

- 
- Pemimpin Tim Kerja yang diberikan wewenang
 - Divisi yang harus terlibat dalam Tim Kerja
 - Kewajiban Tim Kerja untuk memahami ESG dan Laporan Keberlanjutan (termasuk mengikuti seminar internal)
 - Tenggat waktu pengumpulan data masing-masing divisi
 - Pertemuan rutin untuk laporan kemajuan pengumpulan data di hadapan **Top Management**

3

Apa saja divisi yang harus ikut serta dalam pengumpulan data dan penyusunan Laporan Keberlanjutan?

Di bawah ini adalah contoh tabel pemetaan tentang divisi-divisi yang dapat terlibat dalam penyusunan. Karena setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, pemetaan ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing.

Tabel ini bisa diisi dengan departemen yang bertanggung jawab dan dapat memberikan data terkait topik-topik ini.

Ekonomi

Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan.

...

Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	...
Lingkungan Hidup	
Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	...
Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan	...
Energi: a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan	...
Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	...
Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: a) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; b) usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna	...
Emisi, paling sedikit memuat: a) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; b) upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan	...
Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: a) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; c) tumpahan yang terjadi (jika ada)	...
Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan	...
Sosial	
Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen	...

Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak	...
Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	...
Lingkungan bekerja yang layak dan aman	...
Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.	...
Masyarakat lokal: informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan	...
Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	...
TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.	...

Inovasi Produk/Jasa

Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	...
Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	...
Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif	...
Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	...
Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	...

Tata Kelola

Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	...
Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	...

Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

...

*Tabel 3.1
Tabel Pemetaan Topik dan Divisi Penanggung Jawab*

Selain data kuantitatif, perusahaan juga harus menuliskan analisa kontekstual dalam bentuk narasi untuk mendampingi data numerikal, dan juga sebagai bagian penjelasan tentang apa yang dialami oleh perusahaan, seperti risiko bisnis, tantangan, dan juga langkah-langkah ke depan untuk meningkatkan kinerja positif ESG.

Jangan lupa, perusahaan juga harus menuliskan informasi perusahaan, strategi keberlanjutan, dan hal-hal lainnya seperti yang disyaratkan **dalam POJK 51/2017**, selain kinerja Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Inovasi Produk/Jasa di atas.

4

Bagaimana menuliskan narasi pendamping dan analisa kontekstual sebagai cerita?

Laporan Keberlanjutan berisi data angka dan narasi untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam perusahaan di balik angka tersebut.

Narasi dapat terdiri dari poin-poin di bawah ini:

- **Konteks operasional perusahaan untuk menjelaskan mengapa data terlihat seperti ini**
(misal, adanya kenaikan produksi; adanya penurunan permintaan, dll)
- **Tantangan dalam setiap topik**
(misal, tantangan untuk pengurangan energi; tantangan dalam manajemen limbah)

● Target dan Strategi

Untuk setiap topik, perusahaan dapat menyertakan target perbaikan yang ingin dicapai, periode pencapaian, dan strategi untuk mencapainya (misal, perusahaan berupaya untuk mengurangi limbah yang dibuang ke TPA sebesar 30% dari tahun 2022, untuk dicapai pada tahun 2025. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:.....)

Di bawah ini adalah contoh narasi yang dapat dijadikan contoh dalam penulisan:

Konteks	Konsumsi utama energi di Perusahaan terdiri dari konsumsi energi listrik dan bahan bakar. Sejak tahun ...Perusahaan mulai menggunakan bauran energi terbarukan, seperti biomassa dan biodiesel. Kedua jenis energi tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dan fasilitas pendukung perusahaan, yaitu....
Tantangan	Selama tahun 2020, perusahaan melakukan penghematan energi berupa....[isi dengan upaya perusahaan untuk mengadopsi teknologi/alat dengan energi lebih rendah, menambah sumber energi terbarukan selama tahun tersebut]. Dalam upaya penghematan energi, perusahaan menghadapi tantangan, sebagai berikut:.....
Target dan Strategi	Sebagai perusahaan kelapa sawit, kami terus berupaya untuk meningkatkan peran kami untuk melestarikan lingkungan hidup. Untuk mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, maka rencana jangka panjang ...tahun kami adalah..... [isi dengan upaya dan target efisiensi energi dan bauran energi terbarukan]

Tabel 3.2
Contoh Narasi Pendamping untuk Topik Energi

Bagaimana membuat template data?

Tim Kerja dapat duduk bersama membuat template data yang dapat memudahkan pengisian data oleh pihak-pihak yang terkait.

Template data ini dapat dibuat dalam bentuk dokumen Excel, disusun sesuai permintaan data **POJK 51/2017** dan GRI Standards, dan diberikan ruang untuk menuliskan narasi pendamping.

- Contoh template data untuk aspek lingkungan hidup dapat dilihat dalam tautan:

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/006/116/original/Panduan_Lingkungan_Final_%281%29.pdf?1645111954



- Contoh template data untuk aspek sosial dan kesetaraan gender dapat dilihat dalam tautan:

bit.ly/GenderReportingToolkit



- Contoh template data lengkap dan narasi pendamping untuk sektor agrikultur dapat diakses melalui tautan:

https://www.pisagro.org/pdf/Toolkit%20PISAgro_FA_1011_Final.pdf



Bagaimana bila perusahaan terdiri dari berbagai entitas anak usaha sehingga data tak selalu lengkap mewakili keseluruhan entitas?

Laporan keberlanjutan mengenal istilah ‘batasan’ (*boundary*) yang merujuk pada ‘ruang lingkup’ data yang diambil. Misalnya, bila sebuah bank yang memiliki 100 (seratus) kantor cabang di seluruh Indonesia baru bisa melaporkan data penggunaan energi dari 80 (delapan puluh) kantor cabangnya, maka bank tersebut dapat menuliskan keterangan di dalam laporan keberlanjutannya untuk aspek energi, sebagai berikut:

“Dalam pelaporan tahun 2022, perusahaan berhasil mengumpulkan data penggunaan energi dari 80 kantor cabang. Karena tantangan di lapangan berupa....,

maka 20 kantor cabang lain yang terletak di.....masih belum dapat memberikan data energi. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan data di periode pelaporan berikutnya dan menargetkan seluruh kantor cabang terlibat dalam data yang disuguhkan selambat-lambatnya pada pelaporan periode 2024.”

Dari contoh di atas, diharapkan perusahaan memberikan penjelasan tentang tantangan konkret yang dihadapi dan target untuk kelengkapan data.

7

Bagaimana bila data yang disuguhkan menunjukkan performa perusahaan yang ‘kurang baik’?

Laporan keberlanjutan bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait strategi perbaikan dan pengembangan perusahaan untuk berkontribusi positif bagi ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam implementasi strategi ini, perusahaan pasti menghadapi berbagai tantangan, situasi ekonomi-politik yang selalu berubah, dan hal-hal yang tidak menentu lainnya. Bila data yang disajikan dapat menimbulkan persepsi bahwa kinerja perusahaan kurang baik, Anda dapat memberikan penjelasan dalam bentuk narasi sesuai dengan struktur di bawah ini:

- Jelaskan apa tantangan yang dihadapi sehingga membuat kinerja tidak maksimal.
- Uraikan apakah tantangan ini merupakan sesuatu yang berada di bawah kendali kita atau tidak, dan apa yang sudah perusahaan lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut.
- Identifikasi perbaikan seperti apa yang ingin dilakukan ke depan, serta target pencapaiannya (misal, Perusahaan akan meningkatkan kemitraan dengan pemasok lokal untuk memperkuat kesinambungan pasokan bahan baku, sebesar 20% dari jumlah pemasok lokal saat ini yang akan direalisasikan sebelum tahun 2025).
- Jelaskan langkah-langkah konkret ke depan untuk mengatasi dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan dan mencapai target perbaikan yang ditetapkan.

Bagaimana menyelaraskan kinerja perusahaan saat ini dengan strategi keberlanjutan jangka panjang?

Laporan keberlanjutan tidak hanya berisi data kinerja saja, tetapi data-data ini harus digunakan sebagai pijakan untuk menyusun strategi keberlanjutan jangka panjang. Aspek Strategi Keberlanjutan turut disyaratkan oleh **POJK 51/2017** untuk dituliskan dalam laporan keberlanjutan.

Strategi Keberlanjutan diharapkan untuk fokus pada topik ESG yang berdampak dari perusahaan ke lingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta relevan dengan sektor bisnisnya. Dalam Strategi Keberlanjutan, perusahaan menuliskan alasan, target yang ingin dicapai, dan tahun pencapaian target tersebut.

Untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk mencapai target tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan data kinerja yang sudah ada, serta tantangan yang selama ini dihadapi.

Di bawah ini adalah contoh strategi keberlanjutan perusahaan manufaktur:

Aspek	Narasi Penjabaran
Fokus Topik	Salah satu strategi keberlanjutan perusahaan Hujan Badai adalah peningkatan keterwakilan perempuan di seluruh tingkatan manajemen perusahaan.
Alasan	Perusahaan percaya peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih beragam dan kreatif. Selain itu, perusahaan juga ingin berkontribusi pada SDGs 5: Kesetaraan Gender.
Target dan Tahun Pencapaian	Pada tahun 2025, perusahaan menargetkan peningkatan jumlah karyawan perempuan sebanyak 30% dari tahun 2022, di setiap tingkatan manajemen.

Bila perusahaan memutuskan untuk mengubah fokus strateginya di tengah perjalanan, perusahaan dapat menjelaskan alasannya mengapa dalam bentuk narasi.

Bagaimana bila ada yang data yang ingin dikoreksi dari Laporan Keberlanjutan periode sebelumnya?



Selalu ada kemungkinan data yang disajikan pada pelaporan periode sebelumnya harus dikoreksi. Perusahaan biasanya mempertajam metodologi perhitungannya atau menambah entitas perusahaan dalam ruang lingkup data, sehingga data yang sudah disampaikan mengalami perubahan. Dalam hal ini, perusahaan diijinkan

Dalam GRI 2-4 “Restatements of Information”, perusahaan dapat menjelaskan mengapa data tersebut harus dikoreksi dan dampaknya terhadap pelaporan pada tahun berjalan.

Apakah data dalam Laporan Keberlanjutan harus melalui proses verifikasi resmi oleh lembaga assurance (penjamin)?

POJK 51/2017 tidak mewajibkan perusahaan untuk melakukan verifikasi data. Bila perusahaan ingin melakukan validasi terhadap data yang disajikan, perusahaan dapat melakukan proses *assurance* (penjaminan). Proses ini berbayar dan melibatkan lembaga konsultan/penjamin.

Sebelum memutuskan untuk melakukan penjaminan, perusahaan dapat mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:

- 1 Tujuan penjaminan (misal, apakah investor atau kreditur mensyaratkannya)
- 2 Ruang lingkup penjaminan (misal, sejauh mana proses penjaminan akan dilakukan)
- 3 Lembaga penjaminan (misal, lembaga mana yang dinominasikan, portofolio, serta sejauh mana pengalamannya dalam melakukan penjaminan)
- 4 Biaya investasi (misal, apakah biaya yang diajukan oleh lembaga penjamin sesuai dengan anggaran perusahaan)

Contoh Pemetaan POJK 51/2017, dan GRI Standards 2021

Tabel di bawah ini adalah relasi antara **POJK 51/2017** dengan GRI Standards 2021.

Ekonomi	
Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan.	GRI 201: Kinerja Ekonomi
Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	
Lingkungan Hidup	
Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	N/A
Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan	GRI 301: Material
Energi: a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan	GRI 302: Energi
Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	GRI 304: Keanekaragaman Hayati
Keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: a) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; b) usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna	GRI 304: Keanekaragaman Hayati

Emisi, paling sedikit memuat: a) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; b) upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan	GRI 305: Emisi
Limbah dan efluen, paling sedikit memuat: a) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; b) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; c) tumpahan yang terjadi (jika ada)	GRI 306: Air Limbah (Efluen) dan Limbah
Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan	GRI 413: Masyarakat Lokal
Sosial	
Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen	N/A
Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak	GRI 401: Kepegawaian
Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	GRI 401: Kepegawaian
Lingkungan bekerja yang layak dan aman	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan
Masyarakat lokal: informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan	GRI 413: Masyarakat Lokal
Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	GRI 413: Masyarakat Lokal
TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.	GRI 413: Masyarakat Lokal
Inovasi Produk/Jasa	
Inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	N/A
Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan

Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif	N/A
Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	N/A
Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	N/A
Tata Kelola	
Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Disclosure 2-9 Governance structure and composition
Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Disclosure 2-16 Communication of critical concerns Disclosure 2-17 Collective knowledge of the highest governance body
Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	Disclosure 2-12 Role of the highest governance body in overseeing the management of impacts Disclosure 2-13 Delegation of responsibility for managing impacts Disclosure 2-14 Role of the highest governance body in sustainability reporting

Catatan:

Kategori 'N/A' berarti tidak ada GRI Standards yang benar-benar selaras untuk topik tersebut. LJK/Emiten/Perusahaan Publik dapat menuliskan topik tersebut sesuai dengan konteks perusahaannya, atau memilih Topik dalam GRI Standards yang relevan dengan konteks/pendekatan yang ingin dilaporkannya.

Selain itu, pengguna harus membuka langsung GRI Standards 2021 untuk memetakan kembali Standar GRI yang dapat digunakan untuk menjawab **POJK 51/2017** sesuai dengan konteks masing-masing.



GRI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Swiss yang mendukung penerbitan panduan ini, melalui dukungan pendanaan dari the State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Panduan ini tidak merepresentasikan pandangan dari Pemerintah Swiss.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Economic Affairs SECO

Indonesia Corporate Secretary Association(ICSA)

Epicentrum Epiwalk, Level 5th Suite A509,
Jl. H.R. Rasuna Said No.RT.16, RT.2/RW.5,
Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940